

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sektor publik dapat diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2002). Sektor publik mencakup semua lembaga pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Aktivitas sektor publik baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertujuan untuk menarik perhatian publik dalam suatu hal atau isu dalam melayani publik namun tidak bersifat mencari laba (moneter) atau disebut lembaga non profit.

Perkembangan di era sekarang ini, praktik akuntansi sektor publik lebih banyak menarik perhatian masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana aktivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya secara tertib, taat perundang-undangan, transparan, efisien, dan memberikan manfaat. Karena itu pemerintah daerah dituntut dapat menunjukkan performa dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang disusun setiap periode tahun berakhir.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan sebuah perusahaan ataupun lembaga pemerintahan dalam suatu periode akuntansi sebagai hasil dari kinerja perusahaan tersebut. Pelaporan keuangan meliputi semua aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan suatu perusahaan. Aspek yang terlibat diantaranya peraturan yang berlaku sesuai Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), lembaga penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi dan entitas pelapor.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Secara spesifik, tujuan pelaporan yakeuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang disusun haruslah bersifat akuntabilitas, transparan, dan memberi manfaat kepada para pihak sebagai dasar mengambil keputusan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih akuntabel dan semakin diperlakukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman atau kompetensi dari seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan daerah yang berpedoman pada SAP. Selain kompetensi sumber daya manusia juga diperlukan adanya pemanfaatan teknologi informasi guna menunjang dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara yang kompeten. Pemerintah telah menggariskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setidaknya ada dua tugas penting yang diamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, dan (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Untuk itu variabel sistem pengendalian intern termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena mengingat banyaknya publik yang meminta transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari pemeriksaan BPK tahun 2017 terjadi peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan di berbagai wilayah provinsi di Indonesia, termasuk provinsi Jawa Tengah. Di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018, memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2017 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD Tahun 2017 tersebut, BPK memberikan 411 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (76%), 113 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (21%), dan 18 opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (3%). Capaian tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian LKPD yang mendapatkan opini WTP sebanyak 6 poin persen dari 70% pada tahun 2016 menjadi 76% pada tahun 2017.

Salah satu wilayah yang mendapat opini WTP tentunya pemerintah daerah Kota Semarang. Walaupun pemerintah daerah kota Semarang telah mendapatkan opini WTP bukan berarti sudah bebas dari penyimpangan dan tidak terhambat oleh berbagai kendala. Seperti yang diuraikan dalam IHPS I Tahun 2018, kenaikan

kualitas LKPD 2017 didukung oleh upaya-upaya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Atas 131 LKPD yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Akun terbesar yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD tahun 2017 adalah Aset Tetap pada 109 pemerintah daerah, Aset Lancar pada 70 pemerintah daerah, dan Belanja Modal pada 48 pemerintah daerah. Adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yaitu tidak sesuai dengan SAP berpengaruh pada sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern dalam menyajikan laporan keuangan.

Menurut Mahaputra, dkk (2014), Kiranayanti, dkk (2016), Pradono, dkk (2015), Setyowati, dkk (2016), dan Edlin, dkk (2018), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor kompetensi sumber daya manusia (SDM). Kompetensi SDM meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan metode akuntansi dan berdasarkan SAP. Pengetahuan dan ketrampilan diperlukan untuk dapat mengelola dan menyajikan informasi akuntansi. Oleh karena itu, kompetensi SDM penting dimiliki untuk menentukan kualitas laporan keuangan yang akan disajikan.

Variabel lain yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan adalah peran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini haruslah

dimanfaatkan pada sektor publik. Penjelasan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian Mahaputra, dkk (2014), Pradono, dkk (2015), Edlin, dkk (2018), variabel peran teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun hasil yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, dkk (2016) menunjukkan bahwa peran teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian Setyowati, dkk (2016) telah dilakukan uji regresi dengan hasil variabel peran teknologi informasi memberikan nilai koefisien 0,676 (t hitung < t tabel) dengan probabilitas signifikan 0,504 (lebih besar dari nilai probabilitas 0,05) dapat dikatakan bahwa variabel peran teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang.

Selanjutnya, permasalahan akuntabilitas publik muncul apabila pemerintah daerah tidak mampu menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara relevan, handal, dan dapat dimengerti oleh para pengguna informasi khususnya masyarakat. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan

pemerintah daerah harus bermanfaat dan sesuai kebutuhan para pengguna informasi. Informasi dapat berguna apabila informasi dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian Mahaputra, dkk (2014), Kiranayanti, dkk (2016), Pradono, dkk (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Edlin, dkk (2018) berbeda. Hasil uji hipotesis p -value $0,146 > 0,05$ sehingga hipotesis ditolak. Artinya, variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Dilihat dari berbagai hasil penelitian yang bervariasi dan bertolak belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kualitas laporan keuangan di salah satu wilayah provinsi Jawa Tengah, yaitu kota Semarang pada tahun 2017.

Penelitian ini meneliti kembali dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyowati, dkk tahun 2016. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu pada variabel yang akan diteliti dengan mengganti variabel peran internal audit pada penelitian Setyowati, dkk dengan variabel sistem pengendalian intern. Objek penelitian sama yaitu di pemerintah daerah kota Semarang, hanya saja yang membedakan pada tahun laporan keuangan yang akan diteliti yaitu tahun 2017.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena bisnis yang sudah diuraikan, dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di kota Semarang, sudah ternilai bagus dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, perlu ditelusuri lebih lanjut apa saja yang dapat menjadi kendala dalam menyusun laporan keuangan. Maka, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2017?
- 2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2017?
- 3) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2017?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2017?
- 2) Untuk mengetahui pengaruh peran teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2017?
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2017?

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

4.1 Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama akuntansi sektor publik, berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Instansi Pemerintah Terkait

Sebagai dasar evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan sebagai pertimbangan untuk penyusunan laporan keuangan selanjutnya agar tetap akuntabel.

2) **Bagi Masyarakat**

Menjadi bahan dan sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3) **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Untuk memacu dan mendorong peneliti selanjutnya meneliti lebih banyak terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.